

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP
KINERJA ANGGARAN PADA SKPD
KABUPATEN ACEH BESAR**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh

**AMALLIA AMANDA
NPM : 2002110067**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 25 Januari 2024

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

AMALLIA AMANDA
NPM : 2002110067

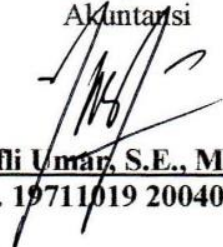
Dengan judul:

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP KINERJA ANGGARAN PADA SKPD KABUPATEN
ACEH BESAR**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

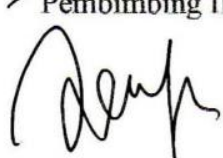
Ketua Program Studi
Akuntansi


H. Zulkifli Umar, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


Irmawati, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19750211 200406 2 001

Pembimbing II


Intan Rizkia Chudri, S.E., M.Si
NIK. 19871208 201306 2 001



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi


Drs. Irmawati Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK: 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 25 Januari 2024

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

AMALLIA AMANDA
NPM : 2002110067

Dengan judul:

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP KINERJA ANGGARAN PADA SKPD KABUPATEN
ACEH BESAR**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 20 Januari 2024

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M
NIK. 10700408 199401 1 001

Sekretaris

Irmawati, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19750211 200406 2 001

Anggota

Intan Rizkia Chudri, S.E., M.Si
NIK. 19871208 201306 2 001

Anggota

Cut Fitrika Syawalina, S.E., M.Si
NIK. 19810823 201309 2 001

Mengetahui

Ketua Program Studi Akuntansi



Zulkifli Umar, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 25 Januari 2024

Yang Menyatakan


Amalia Amanda

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Amallia Amanda
NPM : 2002110067
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA ANGGARAN PADA SKPD KABUPATEN ACEH BESAR

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 25 Januari 2024

Yang Menyatakan,



Amallia Amanda
Amallia Amanda

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Anggaran pada SKPD Kabupaten Aceh Besar**". Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Aceh.

Penulis menyadari ketika membuat proposal ini banyak masalah yang dihadapi, namun kemudahan yang diberikan Allah SWT membuat penulis kuat menghadapi masalah tersebut. Penulis merasa masih banyak kesalahan dari proposal ini, hal itu semata-mata karena kekurangan penulis. Untuk itu, penulis memohon maaf jika terdapat kesalahan pada proposal ini. Penulis berharap proposal ini bisa diterima. Semoga terdapat manfaat pada proposal ini yang bisa berguna dan diaplikasikan ke dalam lingkup masyarakat. Oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis dalam menyempurnakan penulisan ini

Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Kepada orang tua bunda Nurliani Siregar dan ayah Aulia Rachman, terimakasih untuk hari-hari telah kau habiskan untuk, menjaga,

menyayangi, mendidik, dan membimbing, serta selalu mendoakan penulis.

Mereka berdua sudah bekerja keras untuk penulis

2. Bapak Drs. Tarmidzi Gadeng SE,M.SI, MM selaku Dekan dan Ibu Syamsidar SE,M Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Irmawati dan Ibu Intan Rizkia Chudri, SE,M,Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dorongan dan arahan dari merencanakan hingga selesainya penelitian ini
4. Kepada adik tercinta, alifya rahmaini adha . karena selalu memberikan support dan semangat kepada kakaknya dan juga memberikan bantuan baik material maupun non-material. Dan selalu ada disaat suka maupun duka.
5. Kepada bidadari surgaku ibu nurliani siregar S.Pd yang hingga detik ini terus berjuang memberikan yang terbaik kepada putrinya baik secara materi maupun dukungan moral. Yang telah menjadi penyemangat bagi penulis untuk terus berjuang dalam menyelesaikan pendidikan sarjana-1 ini. Tolong hidup lebih lama di dunia ini, izinkan saya untuk mengabdikan dan membalas segala pengorbanan yang sudah dilakukan selama ini
6. Terakhir penulis persembahkan untuk diri sendiri, karena telah mampu mengendalikan berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Motto

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

”kadang kita harus merasakan rasa pahit untuk benar-benar menikmati rasa manis
ketika datang kepada kita” –Huang Renjun

” I feel like the possibility of all possibilities being possible is just another possibility
that could possibility happen” – Mark Lee

“Terbentur, terbentur, terbentur, terbentur”

(Tan Malaka)

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya
untuk membalas kebaikan dari semua pihak yang telah mendukung dan membantu
penulis selama ini.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Banda Aceh, 20 Desember 2023
Penulis

Amallia Amanda

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	9
2.1. Landasan Teoritis	9
2.1.1. Kinerja Anggaran	9
2.1.1.1. Definisi Anggaran	9
2.1.1.2. Definisi Kinerja Anggaran	9
2.1.1.3. Indikator Kinerja	11
2.1.1.4. Kinerja Instansi Pemerintah	13
2.1.2. Akuntabilitas	13
2.1.3. Transparansi	15
2.1.4. Partisipasi Masyarakat.....	17
2.2. Penelitian Sebelumnya	18
2.3. Kerangka Pemikiran.....	21
2.3.1. Hubungan Akuntabilitas dengan Kinerja Anggaran	21
2.3.2. Hubungan Transparansi dengan Kinerja Anggaran	22
2.3.3. Hubungan Partisipasi Masyarakat dengan Kinerja Anggaran	23
2.4. Hipotesis.....	25

BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1. Desain Penelitian.....	27
3.1.1. Lokasi dan Objek Penelitian	27
3.1.2. Jenis Penelitian	27
3.1.3. Waktu Penelitian	28
3.1.4. Unit Analisis	28
3.2. Populasi dan Sampel Penelitian	29
3.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	31
3.4. Definisi Operasional Variabel	32
3.4.1. Variabel Bebas (Independent Variabel)	32
3.4.2. Variabel Terikat (Dependent Variabel)	34
3.5. Teknik Analisis Data	39
3.6. Pengujian Data	41
3.6.1. Uji Validitas	41
3.6.2. Uji Keandalan	42
3.6.3. Uji Normalitas	42
3.6.4. Uji Multikolinearitas	42
3.6.5. Uji Heteroskedastisitas	43
3.7. Pengujian Hipotesis.....	44
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 46
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	46
4.2. Hasil Penelitian	47
4.2.1. Karakteristik Responden	47
4.2.2. Analisis Deskriptif	49
4.2.3. Hasil Pengujian Data	56
4.2.4. Regresi Linier Berganda	61
4.2.5. Pengujian Hipotesis	61
4.3. Analisis Deskriptif	48
4.3.1. Variabel Akuntabilitas	48
4.3.2. Variabel Transparansi	51
4.3.3. Variabel Partisipasi Masyarakat	52
4.3.1. Variabel Kinerja Anggaran	53
4.4. Pembahasan	66
4.4.1 Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Anggaran	66
4.4.2. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Kinerja Anggaran	66
4.4.3. Pengaruh Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran	67

4.4.4. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Anggaran	67
--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1.Kesimpulan	68
5.2.Saran	68

DAFTAR PUSTAKA	70
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya	19
Tabel 3.1 Skala Likert	29
Tabel 3.2 Populasi dan Sampel Penelitian	30
Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel.....	34
Tabel 4.1 Karakteristik Responden	47
Tabel 4.2 Jawaban Responden terhadap Akuntabilitas	49
Tabel 4.3 Jawaban Responden terhadap Tranparansi	51
Tabel 4.4 Jawaban Responden terhadap Partisipasi Masyarakat	53
Tabel 4.5 Jawaban Responden terhadap Kinerja Anggaran.....	54
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Validitas	56
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Reliabilitas	58
Tabel 4.8 Hasil Pengujian Normalitas.....	59
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Multikolineritas.....	60
Tabel 4.10 Hasil Pengujian Regresi Berganda.....	61
Tabel 4.11 Hasil Pengujian Determinasi.....	63
Tabel 4.12 Hasil Pengujian secara simultan.....	64
Tabel 4.13 Hasil Pengujian secara parsial.....	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran	25
Gambar 4.1 Hasil Pengujian Normalitas	59
Gambar 4.2 Hasil Pengujian heteroskedastisitas.....	60

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	72
Lampiran 2 Hasil Pengujian	77

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
KINERJA ANGGARAN PADA SKPD
KABUPATEN ACEH BESAR**

**AMALLIA AMANDA
2002110067**

**Pembimbing I : Irmawati SE, M.Si, Ak.CA.
Pembimbing II : Intan Rizkia Chudri, SE, M.Si.**

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Anggaran pada SKPD Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Besar. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 74 responden. Data yang dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan satuan pengukuran skala likert. Teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis data adalah regresi linier berganda dan untuk pengujian hipotesis digunakan uji-F dan uji-t dengan bantuan program SPSS versi 22. Hasil uji-F (simultan) menunjukkan bahwa variabel yang diteliti yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran dengan nilai F sebesar 136,242.

Kata kunci: *Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kinerja Anggaran*

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP
KINERJA ANGGARAN PADA SKPD
KABUPATEN ACEH BESAR**

**AMALLIA AMANDA
2002110067**

**Pembimbing I : Irmawati SE, M.Si, Ak.CA.
Pembimbing II : Intan Rizkia Chudri, SE, M.Si.**

ABSTRACT

The research aims to determine the simultaneous and partial influence of Accountability, Transparency and Community Participation on Budget Performance in SKPD Aceh Besar Regency. This research was conducted at the Aceh Besar Regency Regional Work Unit (SKPD) of Aceh Besar Regency. The total population in this study was 74 respondents. Data was collected using a questionnaire with Likert scale measurement units. The analytical technique used in analyzing the data is multiple linear regression and for hypothesis testing the F-test and t-test are used with the help of the SPSS version 22 program. The results of the F-test (simultaneous) show that the variables studied are Accountability, Transparency and Community Participation as a whole. simultaneously influences Budget Performance with an F value of 136.242.

Keywords: *Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kinerja Anggaran*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap negara harus memiliki standar penyusunan laporan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas termasuk Negara Indonesia. Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang memuaskan berupa tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja anggaran yang transparan dan akuntabilitas. Salah satu cara dengan penyempurnaan sistem akuntansi pemerintahan secara menyeluruh dengan menerbitkan peraturan perundangan yang ditetapkan dalam peraturan menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini, disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Adanya Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. Kinerja anggaran merupakan bentuk dari penyempurnaan sistem penganggaran dengan pendekatan yang lebih rasional dan sistematis, dapat diartikan bahwa sistem penganggaran yang dikelola berorientasi pada elemen indikator kinerja dalam proses penyusunan anggaran, sehingga setiap kegiatan/program harus memiliki sasaran dan tujuan yang terukur baik input, *output*, proses, *impact* dan *outcome*.

Kinerja berlandaskan prinsip-prinsip *Good Governance* diperlukan agar pemerintah daerah dapat menyusun RAPBD sesuai anggaran berbasis kinerja (Piers dan Nizam, 2008). Pada dasarnya tujuan utama terkait dengan anggaran berbasis kinerja yakni agar dapat meningkatkan keekonomisan dan keefesienan suatu anggaran belanja public (Achyani, 2011). Kinerja anggaran mulai tahap penyusunan, pembahasan, sampai penyusunan APBD dan laporan keterangan atas pertanggung jawaban, difokuskan pada besarnya biaya yang akan dianggarkan, atau dapat dikatakan semata-mata jumlah anggaran yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Terserapnya anggaran menjadi yang utama dari pada menghemat anggaran, sehingga mengalami penggunaan anggaran untuk hal-hal yang tidak diperlukan, bahkan melenceng dari pada apa yang telah di targetkan untuk tujuan kinerja pemerintah (Loi, 2015).

Pengukuran kinerja merupakan proses yang berurutan dengan guna memberi penilaian apakah rencana kegiatan atau program telah dilaksanakan dengan benar, dan telah berhasil memenuhi target yang telah di rencanakan sebelumnya saat perencanaan. Pengukuran kinerja diawali dengan menetapkan indikator kinerja yang berguna untuk menyediakan informasi yang dapat memungkinkan unit kerja dalam memantau kinerja untuk mencapai outcome dan output terhadap masyarakat. Bagi para pengambil keputusan, pengukuran kinerja memberikan manfaat dalam memantau dan melakukan perbaikan kinerja dan tetap focus pada tujuan organisasi untuk memenuhi tuntutan dari masyarakat atas akuntabilitas (Anugriani, 2013).

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi anggaran yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintahan yang menjabat sekarang, tidak ada kecurigaan lagi antara masyarakat dan pemerintah, aparat yang menjabat dapat terhindar dari penyalahgunaan jabatan atau wewenang dan pemerintah daerah dapat terhindar dari tindak pidana korupsi.

Transparansi selalu berkaitan erat dengan kata partisipasi dan akuntabilitas. Ketiganya adalah pilar dalam *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik). Dari ketiga prinsip tersebut harus ditegakkan ke semua unit pemerintahan, karena transparansi yang baik biasanya akan diikuti dengan terbangunnya kepercayaan publik pada pengelolaan Negara, yang pada gilirannya kepercayaan tersebut akan diikuti oleh tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat dalam implementasi dan kontrolnya serta pembuatan kebijakan publik (Munawir, 2011).

Sistem akan berjalan baik apabila ada masyarakat yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas anggaran yang bermutu. Dengan adanya partisipasi masyarakat sebagai wujud nyata keterlibatan masyarakat dari suatu proses mulai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi keuangan daerah merupakan pemberdayaan masyarakat yang berarti pula sebagai suatu proses pembangunan masyarakat, sebagai upaya dari pemerintah menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya dan daerahnya sendiri sesuai kemampuan yang ada padanya. Maka oleh sebab itu perlu adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran daerah, agar semua proses berjalan dengan baik sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja anggaran yang bermutu.

Fenomena yang dapat ditelusuri dalam pengelolaan anggaran saat ini yaitu semakin kuatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi publik oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kinerja anggaran sejak tahap penyusunan, pembahasan hingga pengesahan APBD dan laporan keterangan atas pertanggungjawaban, difokuskan umumnya pada besaran biaya yang dianggarkan, atau dengan kata lain semata-mata jumlah anggaran yang mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya. Terserapnya anggaran lebih diutamakan daripada menghemat anggaran, sehingga terjadi penggunaan anggaran untuk hal-hal yang tidak perlu, bahkan melenceng dari target atau tujuan kinerja pemerintah (Loi, 2015). Pengukuran kinerja adalah proses yang berurutan guna memberikan penilaian apakah rencana program atau kegiatan telah dilaksanakan dengan sesuai, dan telah berhasil memenuhi target yang sebelumnya telah ditentukan saat perencanaan. Pengukuran kinerja diawali

dengan menetapkan indikator kinerja guna menyediakan informasi yang memungkinkan unit kerja dalam memantau kinerjanya dalam mencapai output dan outcome terhadap masyarakat. Bagi para pengambil keputusan, pengukuran kinerja memberi manfaat dalam memantau dan melakukan perbaikan kinerja serta tetap fokus pada tujuan organisasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas akuntabilitas (Anugriani, 2013). Pengelolaan kinerja anggaran dan penilaian yang dilakukan oleh SKPD Kabupaten Aceh Besar harus menerapkan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat sehingga memberikan anggaran kinerja yang efektifitas, efesiensi, dan ekonomis.

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tersebut telah di serahkan pada 29 Juni 2020 lalu dan diterima Bupati Aceh Besar Maward Ali serta DPRK.

Tapi meski mendapat opini WTP, BPK juga mendapati sejumlah temuan baik itu menyangkut dengan kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangn-undangan.temuan itu di catat dalam buku II dan III Laporan Hasil Pemeriksaan. Beberapa temuannya berupa Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Belum Sepenuhnya memadai, pengelolaan dana BOS belum sepenuhnya memadai, Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Program Aceh Besar belum Tertib, Bendahara Penerimaan belum menyetorkan PAD atas Retribusi Pelayanan, dan

penganggaran honorarium timauntuk pembinaan dan pengawasan Inspektorat tidak sesuai ketentuan (BPK Aceh 2020).

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan penulis mengambil judul **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Aceh Besar.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada SKPD Kabupaten Aceh Besar
2. Apakah Akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran pada SKPD Kabupaten Aceh Besar
3. Apakah Transparansi secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran pada SKPD Kabupaten Aceh Besar
4. Apakah Partisipasi Masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran pada SKPD Kabupaten Aceh Besar

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat secara simultan terhadap Kinerja Anggaran pada SKPD Kabupaten Aceh Besar
2. Untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas secara parsial terhadap Kinerja Anggaran pada SKPD Kabupaten Aceh Besar
3. Untuk mengetahui pengaruh Transparansi secara parsial terhadap Kinerja Anggaran pada SKPD Kabupaten Aceh Besar
4. Untuk mengetahui pengaruh Partisipasi Masyarakat secara parsial terhadap Kinerja Anggaran pada SKPD Kabupaten Aceh Besar

1.4 Manfaat Penelitian

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain :

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan dan wawasan kepada penulis mengenai Akuntabilitas, Tranparansi, Partisipasi Masyarakat dan Kinerja Anggaran
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi ataupun sebagai data pembanding sesuai dengan bidang yang akan diteliti.
2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan kepada SKPD Kabupaten Aceh Besar. Selain itu pula dapat diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengawasi penganggaran dana SKPD

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang di kemukakan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka penelitian ini dibatasi dengan ruang lingkup penelitian tentang Akuntabilitas, Trasparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Anggaran pada SKPD Kabupaten Aceh besar.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

1.1 Landasan teoritis

1.1.1 Kinerja Anggaran

2.1.1.1 Definisi Anggaran

Menurut Garrison, Norren and Brewer (2007:4), “Anggaran adalah rencana terperinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu periode waktu tertentu.” Sedangkan menurut Rudianto (2009:2) dalam bukunya yang berjudul Penganggaran, “Anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis.”

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi semua aktivitas perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang. Oleh sebab itu rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter, maka anggaran seringkali disebut juga dengan rencana keuangan. Dalam anggaran, satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting dalam arti segala kegiatan akan dikuantifikasikan dalam satuan uang sehingga bisa diukur pencapaian efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

2.1.1.2 Definisi Kinerja Anggaran

Philip Joyce bahwa penganggaran berbasis kinerja mempunyai hubungan dekat dari input ke output atau hubungan antara sumber daya dan hasil untuk tujuan penganggaran (Joyce, 1999, hal. 598). Demikian pula Charles Dawson menjelaskan pengukuran kinerja dan penganggaran sebagai istilah umum yang diterapkan sebagai upaya sistematis untuk menilai aktivitas pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas untuk kemajuan untuk 45 mencapai hasil yang diinginkan (Dawson, 1995, hal. 1.).

sedangkan Menurut Otley (1999), —Kinerja mengacu pada sesuatu yang terkait dengan kegiatan melakukan pekerjaan, dalam hal ini meliputi hasil yang dicapai kerja tersebut. Kinerja juga merupakan sebagai suatu construct yang bersifat multidimensional, pengukurannya juga bervariasi tergantung pada kompleksitas factor-faktor yang membentuk kinerja. Bedanya yang dikemukakan oleh Roger (1994) kinerja merupakan sebagai hasil dari kerja itu sendiri, karena hasil kerja mempunyai kaitan kuat terhadap tujuan strategis pemerintah dan kontribusi ekonomi. Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

Terdapat banyak pengertian anggaran salah satunya yang dikemukakan oleh *Governmental Accounting Standards Board* (GASB) dalam Bahtiar Arif (2002), budget (anggaran) adalah rencana operasi keuangan yang mencakup sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayai suatu kegiatan dalam periode yang telah ditentukan sebelumnya, estimasi pengeluaran yang telah ditentukan. menurut Anugriani (2013), mengemukakan bahwa anggaran mampu dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran

finansial. Adapun menurut Mardiasmo (2002) Anggaran adalah pernyataan tentang estimasi kinerja yang akan dicapai dalam jangka periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Berdasarkan definisi diatas kemudian dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah suatu rencana keuangan yang meliputi pengeluaran dan pendapatan yang digunakan untuk mengestimasi kinerja di masa mendatang. Kemudian dalam akuntansi sektor publik terdapat 2 (dua), yaitu Anggaran Daerah dan Anggaran Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010, menyebutkan bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja paling sedikit mengandung 3 (tiga) prinsip, yaitu: 1. prinsip alokasi anggaran program dan kegiatan yang didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (*money follow function*), 2. prinsip alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (*output and outcome oriented*), 3. dan prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*). Sebelum adanya sistem anggaran berbasis kinerja, penerapan anggaran tradisional cenderung menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan, pemerintah akan menyalahgunakan kedudukan mereka dan cenderung boros. Namun dengan adanya sistem anggaran berbasis kinerja, dominasi pemerintah dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan internal *cost awareness*, audit keuangan, audit kinerja, dan evaluasi kinerja eksternal.

2.1.1.3 Indikator Kinerja

Marrisa (2013), indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja pemerintah antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik.
2. *Good Governance* pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai bagian dari agenda reformasi dengan tujuan agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*).
3. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pelayanan dasar meliputi Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum/ penataan ruang, perlindungan masyarakat, sosial.
4. Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi, dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.

Menurut Annisa (2011), mengemukakan bahwa indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan beberapa indikator diantaranya yaitu:

1. Indikator masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan, untuk menghasilkan keluaran, kebijaksanaan peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.
2. Indikator keluaran (*output*) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau nonfisik.
3. Indikator hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. Indikator manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Indikator dampak (*impact*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Penetapan indikator kinerja yang baik sangatlah penting, karena indikator kinerja dapat dijadikan suatu dasar dalam mengukur suatu kinerja. Dengan adanya indikator kinerja kita dapat mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan

secara efisien dan efektif. Oleh sebab itu, penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasikan.

2.1.1.4 Kinerja Instansi Pemerintah

Definisi kinerja instansi pemerintah sendiri menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No : 239/IX/6/8/2003 adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

2.1.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam bahasa inggris sering disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemegang amanah untuk mengelola, mengungkapkan dan kemudian melaporkan segala aktivitas yang dalam proses pembuatan keputusan anggaran (Adrianto, 2007). Akuntabilitas adalah salah satu dari prinsip good government governance, yaitu sebuah rancangan/konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Rasul (2002) mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan sekelompok ataupun seseorang terhadap masyarakat luas didalam suatu organisasi. Sedangkan Annisaningrum (2010) berpendapat bahwa akuntabilitas ialah

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada perusahaan atau entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara *periodic*. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas menekankan pada pertanggungjawaban dari suatu pelaksanaan kebijakan yang dilakukan secara *periodic* kepada masyarakat dan otoritas yang lebih tinggi.

Prinsip-prinsip akuntabilitas menurut LAN dan BPKP, modul I, (2000) yaitu:

1. Patut memiliki perjanjian dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Patut memberikan tingkat pencapaian tujuan dan kemudian sasaran yang di tetapkan.
4. Mesti berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang dipeoleh, harus jujur, transparan, objektif, dan inovatif sebagai seseorang yang menyebabkan terjadinya perubahan dan menimbulkan kejadian baru padamanajemen dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Dari prinsip-prinsip diatas dijelaskan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban yang kemudian harus dipertanggungjawabkan baik itu berupa kegagalan ataupun keberhasilan program kegiatan secara terbuka, komitmen, konsisten, objektif, jujur dan inovatif didalam pencapaian tujuan dan kemudian sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terdapat dua jenis akuntabilitas yang dikemukakan oleh bahrullah (2013), yaitu sebagai berikut :

1. Akuntabilitas kinerja, ini menekankan pada pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya pablik secara efektif, efesien, dan ekonomis

dalam memberikan yang kualitasnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh publik.

2. Akuntabilitas keuangan, ini menekankan pada pertanggungjawaban integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan dan KKN dalam keuangan dapat dihindari.

Prinsip pertanggungjawaban/akuntabilitas pada publik harus dapat digunakan untuk menciptakan sistem control yang efektif pada pelayanan publik dan penyampaian secara terbuka kepada masyarakat. Hal itu harus juga dilakukan oleh pelaku yang diberi amanah dalam melaksanakan setiap program pemerintah, yakni pada unit pengelolaan kegiatan.

2.1.3 Transparansi

Good Government (pemerintah yang baik) merupakan salah satu ekspektasi atau tujuan dari *Good Government*, selain pelaksanaan prinsip akuntabilitas juga tidak kalah pentingnya juga penerapan prinsip keterbukaan (transparansi). Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi (Mardiasmo, 2004). Lebih lanjut pentingnya prinsip transparansi lebih dikuatkan lewat UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik, didalamnya dijelaskan azas transparansi (keterbukaan) pada penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut UNDP (dalam Mardiasmo, 2009) transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berhubungan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkannya. Adapun Menurut Krina P (2003), Transparansi adalah prinsip yang

menjamin akses dan keberhasilan kepada setiap orang untuk mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Dari beberapa penjelasan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya akuntabilitas merupakan suatu sifat atau keadaan yang dimana mudah dilihat dengan jelas atau dengan kata lain dimana masyarakat mengetahui program yang bersentuhan dengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yang dimandati untuk melaksanakan program kerjanya, termaksud didalamnya keputusan-keputusan, prosedur yang kemudian diambilnya dalam pelaksanaan kepentingan publik. Dalam prinsip transparansi pelayanan publik, pelaksanaan wajib keterbukaan kepada setiap tindakannya dan siap menerima kritikan dan saran, dan mampu mempertanggungjawabkan, kemudian dalam hal ini dapat dijelaskan pada karakteristik transparansi itu sendiri.

Adapun menurut Mardiasmo (2002) karakteristik yang harus menjadi perhatian adalah, sebagai berikut :

1. Informatif (*informativeness*) Memberikan arus informasi, penjelasan mekanisme, berita, data, fakta kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara akurat dan jelas.
2. Keterbukaan (*Openess*) Keterbukaan informasi memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada dibadan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik harus terbuka dan dapat diakses oleh semua 43 pengguna informasi publik, selain itupun informasi yang dikecualikan yang diatur oleh Undang-undang.
3. Pengungkapan (*Disclosure*) Pengungkapan kepada publik ataupun masyarakat atas kinerja finansial dan aktivitas.

Pengungkapan itu sendiri dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pengungkapan sukarela dan pengungkapan wajib. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Keterbukaan memberikan akibat adanya kontrol yang berlebihan dari masyarakat, bahkan oleh media massa oleh karena itu, kewajiban untuk keterbukaan wajib seimbang dengan nilai pembatasan, yang meliputi kriteria yang jelas dari para aparat publik mengenai jenis informasi apa yang mereka berikan dan pada siapa informasi itu diberikan

2.1.4 Partisipasi Masyarakat

Menurut Mulyadi (2001) partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan operating manager dalam memutuskan secara bersama dengan komitmen anggaran mengenai rangkaian kegiatan dimasa depan yang akan ditempuh oleh operating manager tersebut dalam pencapaian anggaran. Proses penyusunan anggaran sektor publik umumnya mengfokus pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Sehubungan dengan dilakukannya reformasi anggaran, proses penyusunan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan bisa menjadi lebih partisipatif (Herdijanto, 2009). Partisipasi penyusunan anggaran ialah pendekatan yang secara umum mampu memh-up gready kinerja yang pada akhirnya mampu meningkatkan efektivitas organisasi. Pratidina (2015) juga mengemukakan partisipasi merupakan sebagai alat untuk mendapatkan tujuan, partisipasi juga sebagai alat untuk mengintegrasikan kebutuhan organisasi dan individu. Sehingga partisipasi mampu

diartikan sebagai berbagi pendelegasian prosedur-produser, pengaruh dan keterlibatan dalam mengambil keputusan.

Kemudian Arifin & Rohman (Schiff & Lewin, 2012), anggaran mempunyai 2 (dua) peranan. Pertama, anggaran juga berfungsi sebagai alat pengendalian untuk mengukur kinerja manajerial. Kedua, anggaran berfungsi sebagai perencanaan, di dalamnya berisi mengenai ikhtisar rencana-rencana keuangan organisasi dimasa depan. *Budgeting* adalah kegiatan mengalokasikan sumberdaya keuangan yang terbatas untuk pembiayaan belanja negara cenderung tanpa batas.

Penganggaran juga mempunyai 3 (tiga) tujuan utama yang saling berkaitan yaitu stabilitas fiskal makro alokasi sumber daya sesuai yang diutamakan atau diprioritaskan, dan pemanfaatan anggaran secara efisien dan efektif, sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran yang berfungsi agar dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, stabilitas ekonomi.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja anggaran, salah satunya adalah penelitian dari Rahma Yana Lubis (2022) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran pada Dinas Pengendalian Anak. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi Anggaran memiliki berpengaruh dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran.

Uttari Premananda (2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran pada pemerintah kota Denpasar. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi Anggaran berimplikasi positif terhadap Kinerja Anggaran pada pemerintah kota Denpasar.

Marselina Saina Setia (2019) melakukan penelitian tentang Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran berkonsep Value For Money pada pemerintah Malang. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Anggaran berkonsep value For Money pada pemerintah kota Malang.

Jamaluddin MD (2022) melakukan penelitian tentang Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran pada pemerintah kota Samarinda. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Anggaran. Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Anggaran. partisipasi Anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Anggaran pada pemerintah kota Samarinda.

Wanda Fernandes (2015) melakukan penelitian tentang Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran pada pemerintah Kabupaten Kamper. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Anggaran pada pemerintah Kabupaten Kampar.

Penjelasan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang telah diuraikan, juga dapat dilihat secara ringkas pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Penelitian sebelumnya

No	Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Yana Lubis (2022)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran pada Dinas Pengendalian Anak	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi Anggaran memiliki berpengaruh dan signifikan terhadap Kinerja Anggaran.	Sama-sama meneliti pada objek kinerja anggaran pemerintah	Instansi Penelitian, waktu dan sampel
2	Uttari Premananda (2017)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran pada pemerintah kota Denpasar	Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan partisipasi Anggaran berimplikasi positif terhadap Kinerja Anggaran pada pemerintah kota Denpasar	Sama –sama meneliti objek kinerja anggaran pemerintah	Lokasi penelitian dan waktu penelitian
3	Marselina Saina Setia (2019)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran berkonsep Value For Money pada pemerintah Malang	Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Anggaran berkonsep value For Money pada pemerintah kota Malang	Sama sama meneliti pada objek kinerja anggaran	Lokasi penelitian dan konsep penelitian
4	Jamaluddin MD (2022).	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi,	Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas	Sama-sama meneliti objek kinerja	Perbedaan instansi,

		dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran pada pemerintah kota Samarinda	berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Anggaran	anggaran pemerintah	waktu dan lokasi
5	Wanda Fernandes (2015)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran pada pemerintah Kabupaten Kamper	Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Anggaran pada pemerintah Kabupaten Kampar	Sama-sama meneliti pada objek kinerja anggaran pemerintah	Lokasi, waktu, populasi dan sampel

Sumber: Data diolah (2023)

2.3 kerangka pemikiran

2.3.1 hubungan akuntabilitas dengan kinerja anggaran

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018:27). Tanjung (2015) mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaa kegiatan suatu entitas pelaporan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk akuntabilitas dari suatu instansi. Akuntabilitas sendiri dapat menjamin

efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggarannya. Akuntabilitas sangat diperlukan sebagai alat ukur kinerja dalam sebuah organisasi termasuk organisasi sektor publik untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Semakin baik akuntabilitas maka akan semakin baik kinerja anggaran pemerintah daerah. Sementara itu Ismiarti (2013: 90- 91) menyimpulkan bahwa implementasi akuntabilitas pada pengelolaan keuangan daerah mampu meningkatkan kinerja. Ciri lain dari akuntabilitas ini selalu berkaitan dengan pengelolaan anggaran, di mana dalam pendekatannya menjelaskan semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik di pusat maupun daerah, semakin baik pula pengelolaan anggarannya.

Suatu organisasi dikatakan akuntabel apabila memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami dan berbagai aktivitas yang dilakukan. Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang dapat diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Akuntabilitas juga merupakan instrument untuk kegiatan control terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Aplikasi akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah diawali pada saat penyusunan program pelayanan publik, pembangunan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaiannya sehingga program tersebut dapat memberikan hasil atau dampak seoptimal mungkin sesuai dengan sarana tujuan (Arifani dkk,2018).

2.3.2 hubungan tranparansi dengan kinerja anggaran

Transparansi diartikan sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap individu dalam memperoleh suatu informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil hasil yang dicapai. Transparansi memiliki makna yaitu ketersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya.

Adanya transparansi menjadikan masyarakat lebih kritis dalam menanggapi kejadian-kejadian yang ada di sekitarnya. Dengan ketersediaan informasi, masyarakat dapat ikut sekaligus mengawasi sehingga kebijakan publik yang muncul bisa memberikan hasil yang optimal bagimasyarakat, serta mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu kelompok masyarakat secara tidak proporsional. Transparansi dalam penganggaran dapat digunakan sebagai suatu sarana untuk mencegah korupsi, sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat/publik dan dapat menciptakan iklim investasi yang baik serta dapat meningkatkan kepastian usaha (Andrianto, 2007: 21). Selain itu, transparansi juga memiliki peran sebagai alat pengendalian atas kinerja yang dilakukan pemerintah. Kebijakan dalam penyusunan anggaran yang dibuat oleh pemerintah merupakan variabel yang penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan anggaran, oleh karena itu semakin transparan

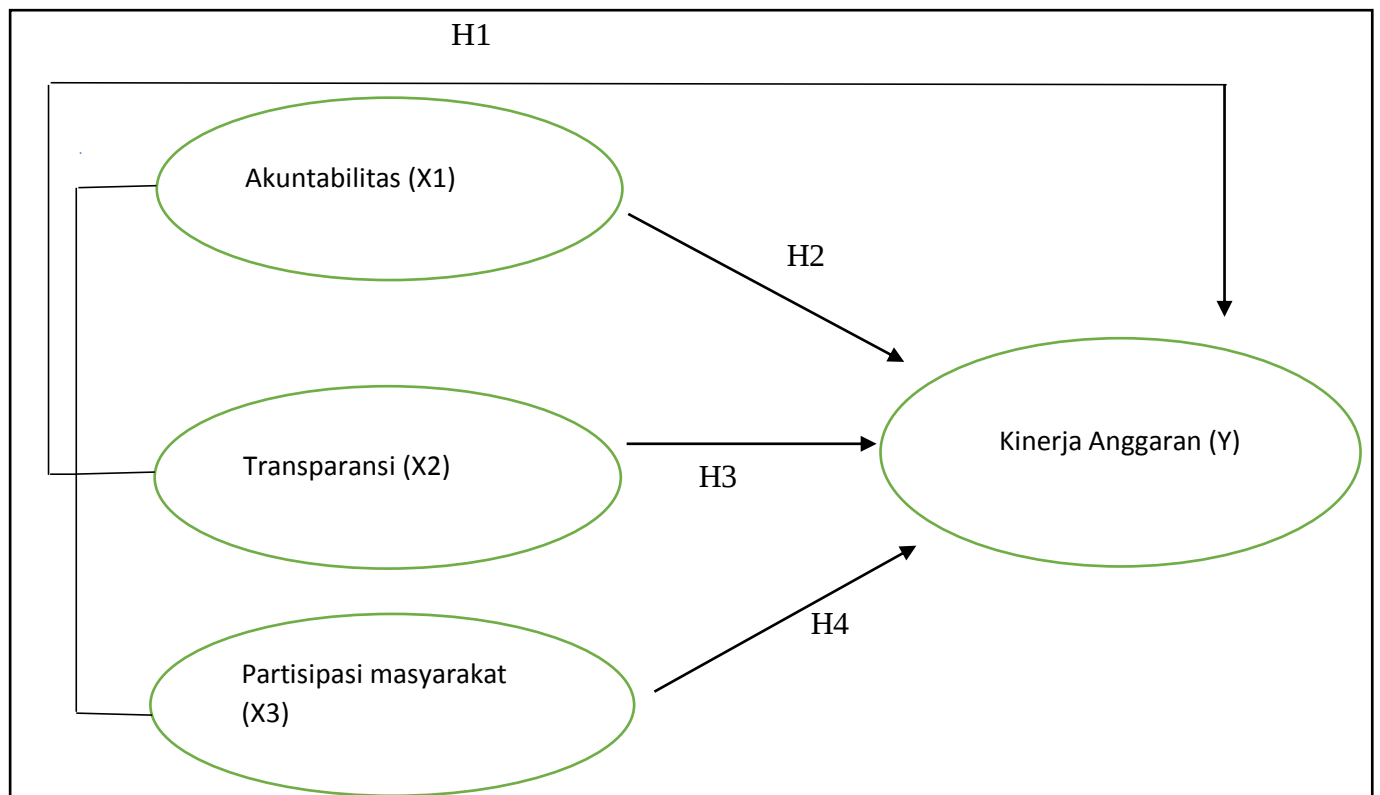
kebijakan itu sendiri maka akses informasi dapat dengan mudah diketahui oleh publik.

2.3.3. hubungan partisipasi masyarakat terhadap kinerja anggaran

Keterbukaan penerimaan peran serta masyarakat dapat terjadi bila adanya suatu kesempatan bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya terhadap pokok-pokok kebijakan pemerintah, adanya kesempatan masyarakat melakukan diskusi dengan pemerintah dan perencana dan adanya pengaruh masyarakat dalam mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Peran serta bentuk perlindungan hukum preventif, peran serta ini dapat berupa pengajuan keberatan terhadap rancangan keputusan atau rancangan pemerintah, dengar pendapat dengan pemerintah dll. (Arifani dkk, 2018). Tujuan pengawasan yaitu untuk mengamati apa yang sesungguhnya terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila ternyata kemudian ditemukan adanya indikasi-indikasi penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dideteksi dan dikenali agar dapat segera diambil tindakan koreksi dan diperbaiki. Melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat tercapai secara maksimal. Selain itu adanya deteksi penyimpangan dapat digunakan sebagai peringatan bagi suatu organisasi, bahwa mereka harus hati-hati dan harus meningkatkan kewaspadaan.

Dalam makna penganggaran, (Brownell and Innes 1986) menjelaskan bahwa keikutsertaan atau partisipasi merupakan mekanisme yang menghimpun individu-individu di dalamnya secara langsung dan berpengaruh pada disusunnya tujuan dari anggaran yang mana prestasinya akan dilihat dan diberi nilai dan besar kemungkinan akan dihargai berdasarkan tercapainya tujuan dari anggaran tersebut. Keikutsertaan tersebut mengindikasikan adanya hubungan timbal balik antara pegawai dan atasan, kemudian pegawai melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan dimulai dari langkah awal disusunnya anggaran, bernegosiasi, dan menetapkan anggaran serta perbaikan anggaran yang dibutuhkan.

Gambar 2.1
Skema kerangka pemikiran



2.4 Hipotesis

berdasarkan tujuan penelitian dan kerangka pemikiran maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian adalah :

H1 : Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Pada SKPD Aceh Besar

H2 : Akuntabilitas Secara Parsial berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Pada SKPD Kabupaten Aceh Besar

H3 : Transparansi Secara Parsial berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Pada SKPD Kabupaten Aceh Besar

H4 : Partisipasi Masyarakat Secara Parsial berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran Pada SKPD Kabupaten Aceh Besar

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rencana dan struktur penelitian yang dibuat sedemikian rupa untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Desain penelitian atau rancangan suatu penelitian harus memiliki 4 (empat) aspek sebagaimana diungkapkan oleh sekaran (2019: 152) yaitu desain penelitian, yang meliputi serangkaian pilihan pengambilan keputusan mengenai tujuan studi (eksploratif, deskriptif, pengujian hipotesis), letaknya (yaitu konteks studi), jenis yang sesuai untuk tujuan penelitian, jenis penelitian, horizon waktu dan unit analisis.

1.1.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini untuk menguji variabel independen terhadap dependen yaitu pengaruh variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap kinerja anggaran. Objek penelitian adalah pegawai SKPD Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan langsung pada SKPD Kabupaten Aceh Besar.

1.1.2 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi empiris dengan pendekatan penelitian deskriptif. Menurut sugiyono (2019:5)

”penelitian deskriptif didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka dan perhitungan statistik dan data kualitatif, yaitu data yang berupa pernyataan responden dan pertanyaan yang diberikan dalam bentuk kuesioner.

1.1.3 Waktu Penelitian

Penelitian deskriptif berdasarkan rentang waktu (*time horizon*) yaitu *one shoot study*. Menurut Sugiyono (2019:47) *one shoot study* merupakan penelitian yang hanya dilakukan pada satu periode terhadap berbagai sampel dalam populasi. Berdasarkan horison waktu, maka data penelitian dikumpulkan melalui satu titik waktu (*one shot study*).

1.1.4 Unit Analisis

Unit analisis merupakan tingkat agregasi data yang dianalisis, antara lain meliputi : individual, kelompok, organisasional, perusahaan, industri atau negara. Data yang dikumpulkan secara individual digunakan untuk menghitung unit analisis pada tingkat agregasi yang lebih besar. Berdasarkan unit observasi yang dijadikan unit analisis dari penelitian ini adalah individu SKPD Kabupaten Aceh Besar. Dari hasil yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dalam bentuk kualitatif dikomposisikan terlebih dahulu agar menjadi data yang kuantitatif. Adapun nilai kuantitatif yang dikomposisikan dilakukan dengan menggunakan skala likert dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Skala Likert

Sangat tidak setuju	Tidak setuju	Kurang setuju	Setuju	Sangat setuju
1	2	3	4	5

1.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah pegawai pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten Aceh Besar yang berjumlah 74 orang (berdasar judul penelitian, sampel dalam penelitian ini hanya pegawai di bidang laporan keuangan dan bidang akuntansi dengan masing-masing satu pegawai). Menurut Notoatmodjo (2017:115) populasi penelitian adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar kecuali pada kantor camat. Alasan peneliti hanya menjadikan sampel dibidang laporan keuangan dan bidang akuntansi karena kedua pegawai tersebut di setiap instansi mempunyai hubungan langsung dengan penyusunan laporan keuangan SKPD Kabupaten Aceh Besar dan dapat mewakili masing-masing SKPD.

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Data yang diperoleh sebagai hasil pengolahan sensus disebut data yang sebenarnya (*true value*), atau sering disebut parameter (supranto, 2017). Metode penarikan sampel dalam penelitian ini yaitu metode sensus dimana seluruh elemen populasi diselidiki satu per satu. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 2 pegawai pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Jumlah SKPD Kabupaten Aceh Besar

No	Nama SKPD Aceh Besar	Pegawai Bidang Akuntansi	Pegawai Bidang Laporan Keuangan	Jumlah Sampel
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	1	2
2	Dinas kesehatan	1	1	2
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1	1	2
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	1	2
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	1	1	2
6	Dinas Sosial	1	1	2
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	1	2
8	Dinas Pangan	1	1	2
9	Dinas Lingkungan Hidup	1	1	2
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	1	2
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	1	1	2
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga, Berencana, PP Dan PA	1	1	2
13	Dinas Perhubungan	1	1	2
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1	2
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1	1	2
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	1	2
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	1	2
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	1	2
19	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	1	1	2
20	Dinas Pertanian	1	1	2
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	1	2
22	HUMAS	1	1	2
23	KESBANGPOL	1	1	2
24	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	1	2

25	Sekretariat Daerah	1	1	2
26	Sekretariat DPRK	1	1	2
27	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1	1	2
28	Inspektorat	1	1	2
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan	1	1	2
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	2
31	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1	1	2
32	Dinas Syariat Islam	1	1	2
33	Dinas Pendidikan Dayah	1	1	2
34	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	1	1	2
35	Sekretariat Majelis Adat Aceh	1	1	2
36	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	1	1	2
37	Sekretariat Baitul Mal	1	1	2
Jumlah		37	37	74

Sumber : <https://acehbesarkab.go.id/berita/kategori/skpd>

1.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Survei kuesioner merupakan metode survei dengan menggunakan kuesioner penelitian. Kuesioner merupakan alat pengumpulan data yang efektif karena dapat diperolehnya data standar yang dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan analisis menyeluruh tentang karakteristik populasi yang diteliti. Kuesioner penelitian ini diserahkan langsung kepada responden atau meminta bantuan kepada salah satu pegawai untuk mengkoordinir penyebaran dan pengumpulan kuesioner pada pegawai tersebut sesuai jangka waktu yang ditentukan.

Menurut Lubis (2017:107) data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti pada saat berlangsungnya penelitian. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah kuesioner. Noor (2017:139)

menyatakan bahwa kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut.

3.4 Definisi Operasional Variabel

3.4.1. Variabel Bebas (Independent Variabel)

a. Akuntabilitas

Di dalam bagian ilmu Akuntansi, akuntabilitas bisa diartikan sebagai pertanggung jawaban. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Organisasi bisa dikatakan akuntabel jika memiliki kompetensi untuk menjelaskan situasi yang dialami dan berbagai aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban bagi pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak *principal* yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002).

b. Transparansi

Transparansi dapat diartikan sebagai kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses

pengambilan keputusan dan penyampaian informasi (Sayuti, et. al, 2018). Transparansi juga bermakna sebagai tersedianya informasi yang akurat, cukup dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya.

Dari definisi transparansi diatas kemudian dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada publik mengenai semua informasi yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintah. Adanya transparansi anggaran memberikan dampak positif bagi kepentingan publik. Adapun beberapa manfaat penting adanya transparansi anggaran yaitu mencegah terjadinya korupsi, meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih bias mengukur kinerja pemerintah, mudah dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan, kemudian meningkatkan karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan mudah terbentuk, meningkatkan kepastian usaha (Nico Andrianto, 2007).

c. Partisipasi masyarakat

Menurut Pasaribu dan Simanjuntak, partisipasi masyarakat berarti masyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dalam pembangunan. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta, karena di seleggarakan dan dibiayai utama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak. (dalam Siti Fatimah,2012:10) Kemudian dikuatkan dengan penelitian Premananda and Latrini (2017) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berbasis VFM.

3.4.2 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel dependen adalah variable terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas (independen). Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah kinerja anggaran. Berdasarkan penjelasan yang sudah dikemukakan dapat dirujuk pada tabel 3.2 definisi operasional variabel.

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
1	Kinerja Anggaran (Y)	suatu kegiatan yang bertujuan untuk pencapaian hasil yang diinginkan.	1. Menghindari pengeluaran yang boros Cermat dalam pengadaan sumber daya 2. Pengguna input yang terendah untuk mencapai output tertentu 3. Menurunkan biaya pelayanan publik kinerja 4. Penggunaan uang publik secara merata	1. Anggaran dikelola secara ekonomis untuk menghindari pengeluaran yang boros atau tidak produktif 2. Anggaran dikelola secara efektif Dimana semua Program yang ditargetkan dapat

No	Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
				mencapai hasil yang telah ditetapkan 3. Anggaran dikelola secara adil (equity) dan merata (equality) dimana ada kesempatan social yang sama untuk mendapatkan pelayanan public yang berkualitas 4. Adanya peran pemerintah daerah untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah 5. Alokasi belanja Anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik 6. Penerapan prinsip ekonomis,

No	Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
				efesien dan efektif dalam penggunaan anggaran. 7. Anggaran selalu digunakan secara efesien atau hemat dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
2	Akuntabilitas (X ₁)	bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik	1. Penghindaran penyalahgunaan jabatan 2. Ketaatan terhadap hukum 3. Proses dan pertanggung jawaban anggaran Pemberian pelayanan public yang cepat, responsive dan minim anggaran 4. Pertimbangan tujuan dapat tercapai atau tidak dan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal	1. Tahap pengelolaan anggaran mengikut sertakan unsur-unsur masyarakat. 2. Anggaran di sajikan secara terbuka, cepat dan tepat kepada seluruh masyarakat 3. Kepentingan pablik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam

No	Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
				pengelolaan anggaran. 4. Anggaran merupakan dokumen rahasia sehingga masyarakat tidak perlu tahu 5. Indikator hasil kinerja yang akan dicapai ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi anggaran 6. Proses dan pertanggung jawaban anggaran diawasi secara terus menerus 7. Penyajian anggaran telah menyertakan informasi masa lalu 8. Dalam mengevaluasi anggaran, hanya membandingkan target

No	Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
				dengan realisasi
3	Transparansi (X ₂)	kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan penyampaian informasi	1. Sistem transparansi kebijakan anggaran 2. Memudahkan mengakses dokumen anggaran 3. Metode pemberian informasi kepada publik	1. pengumuman anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi 2. Informasi yang diberikan kepada public dapat meningkatkan transparansi anggaran 3. Mudah untuk mengakses dokumen mengenai anggaran 4. Musrembang
4	Partisipasi Masyarakat (X ₃)	masyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai dewasa ini merupakan perancang,	1. Adanya forum untuk menampung partisipasi masyarakat 2. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan	1. Menurut saya masyarakat dilibatkan dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan

No	Variabel	Definisi	Indikator	Pengukuran
		penyelenggara, dan pembayar utama dalam pembangunan	3. Fokus pemerintah adalah pada memberikan arah dan mengundang orang untuk berpartisipasi Akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau complain.	kebijakan umum APBD. 2. Saran dan kritik dari masyarakat Menurut saya, dijadikan pertimbangan untuk merevisi anggaran. 3. Forum yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi media yang efektif terhadap revisi dan pelaksanaan anggaran. 4. saya kira masyarakat kurang berperan

3.5 Teknik Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pengujian asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis dengan uji simultan dan uji parsial dengan menggunakan software SPSS (*Statistica Product and Service Solutions*) versi 22.

1. Analisis Data Deskriptif

Analisis statistic deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel yang ditelit. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah yang berupa fakta saat ini dari suatu populasi. Uji statistic deskriptif mencakup nilai rata- rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai standar deviasi dari data penelitian. Statistik deskriptif dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian. Data tersebut meliputi umur, jenis kelamin, latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis terhadap dampak variabel dependen dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda (*Multiple Regression*). Analisis regresi linier berganda (*Multiple Regression*) digunakan untuk menguji variabel satu atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Secara sistematis adapun rumus untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kinerja Anggaran

X1 = Akuntabilitas

X2 = Transparansi

X3 = Partisipasi Masyarakat

A = Konstanta

b_1, b_2, b_3 = Parameter Regresi

E = *Error Term*

3.6 Pengujian Data

Pengujian kualitas data yang dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner, maka kesediaan dan ketelitian dari para responden untuk menjawab setiap pertanyaan variabel-variabel yang merupakan suatu hal penting dalam penelitian ini. Kebebasan suatu jawaban sangat ditentukan oleh alat ukur yang ditemukan. Untuk itu, dalam melakukan uji kualitas data atas data primer ini peneliti melakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

3.6.1 Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau kesahihan suatu instrumen, dimana sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang akan diukurnya. Faktor-faktor yang mengurangi validitas data antara lain ketidakpatuhan responden mengikuti petunjuk pengisian kuesioner dan tidak tepatnya formulasi alat pengukur yaitu bentuk dan isi kuesioner. (Sugiyono, 2019:115). uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *analysis corelation* yang menjelaskan korelasi (hubungan) diantara sejumlah variabel dengan menggunakan satu set dimensi yang disebut faktor. Ukuran data dianggap valid apabila korelasi hitung lebih besar dari angka kritis nilai $-r$ (*table product moment*).

3.6.2 Uji Keandalan (*Reliability*)

Reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam melihat reliabilitas masing-masing instrument yang digunakan, maka peneliti menggunakan koefisien *cronbach alpha*, yaitu suatu instrument dikatakan reliabel jika memiliki nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,60.

3.6.3 Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dua model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan dua cara yaitu: 1) uji kolmogorov smirnov dan 2) grafik normal probability plot. Pada kolmogorov smirnov dapat dilihat: Jika probabilitas $> 0,05$ maka data penelitian memenuhi asumsi normalitas. Dan apabila probabilitas $< 0,05$ maka data penelitian dianggap tidak memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan Pada grafik normal probability plot data dalam penelitian ini dapat dikatakan terdistribusi apabila titik-titik pada grafik mendekati garis diagonal (Supranto dan Abdullah, 2017).

3.6.4 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak orthogonal.

Variabel ortogonal yang merupakan variabel independen yang nilai korelasi antara sesama variabel independen sama dengan nol. Adapun cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*).

1. Jika nilai tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolonieritas pada penelitian tersebut.
2. Jika nilai tolerance $< 0,10$ dan VIF > 10 , maka terjadi gangguan multikolonieritas pada penelitian tersebut (Ghozali, 2013).

3.6.5 Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi, ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Kemudian untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas bisa dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik Scatter Plot. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang beraturan maka itu menunjukkan bahwa heteroskedastisitas telah terjadi, dan apabila tidak ditemukan pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka heteroskedastisitas tidak terjadi. Intrepetasi yang digunakan selain melihat grafik Scatter Plot adalah uji Park dimana pada uji ini dilakukan dengan meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Masalah heterokedastisitas tidak akan terjadi apabila nilainya signifikansi antara variabel

independen dengan absolut lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 pada tingkat kepercayaan 5% (Supranto dan Abdullah, 2017).

3.7 Pengujian Hipotesis

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Uji Regresi secara simultan

- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau P_{value} (nilai signifikan $> 0,05$) maka H_0 tidak ditolak (H_a tidak diterima). Artinya bahwa variabel independen secara bersama – sama (simultan) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau P_{value} (nilai signifikan $< 0,05$) maka H_a tidak ditolak (H_0 tidak diterima). Artinya bahwa variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen

2. Uji Regresi secara parsial

Kriteria Pengujiannya adalah :

- Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau P_{value} (nilai signifikan $> 0,05$) maka H_0 tidak ditolak (H_a tidak diterima). Artinya bahwa, variabel independen secara individu (parsial) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau P_{value} (nilai signifikan $< 0,05$) maka H_a tidak ditolak (H_0 tidak diterima). Artinya bahwa variabel independen secara individu (parsial) berpengaruh terhadap variabel dependen.

3. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 memiliki interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai R^2 (*Adjusted r square*) bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk mendeteksi variabel dependen. Sedangkan jika R^2 bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen masih sangat terbatas.

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah, sebagai berikut:

- a. Jika R^2 mendekati 0 berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak kuat.
- b. Jika R^2 mendekati 1 berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Aceh Besar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum di mekarkan pada akhir tahun 1970-an ibu kota Kabupaten Aceh Besar adalah Kota Banda Aceh. Setelah Kota Banda Aceh berpisah menjadi Kota Madya tersendiri, Ibukota Kabupaten di pindahkan Jantho di Pegunungan Seulawah. Kabupaten Aceh Besar juga merupakan tempat kelahiran pahlawan Nasional Cut Nyak Dhien yang berasal dari Lampadang.

Pada waktu Aceh masih sebagai sebuah kerajaan, yang di maksud dengan Aceh atau kerajaan Aceh adalah wilayah yang sekarang di kenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar ditambah dengan beberapa kenegerian/Daerah yang telah menjadi bagian dari Kabupaten Pidie. Selain itu, juga termasuk pulau Weh (sekarang telah menjadi pemerintah Kota Sabang), sebagai wilayah pemerintah kota Banda Aceh, dan beberapa kenegerian/Daerah dari wilayah Kabuaten Aceh Barat. Aceh Besar dalam istilah Aceh disebut Aceh Rayeuk. Penyebutan Aceh Rayeuk sebagai Aceh yang benarnya karena daerah inilah yang pada mulanya menjadi inti kerajaan Aceh dan juga karena disitulah untuk nama Aceh Rayeuk ada juga yang menamakan dengan sebutan Aceh Lhee Sagoe.

Wilayah darat Aceh Besar berbatasan dengan Kota Banda Aceh disisi Utara, Kabupaten Aceh Jaya di sebelah Barat Daya, serta Kabupaten Pidie disisi Selatan dan Tenggara. Aceh Besar juga mempunyai wilayah kepulauan yaitu wilayah kecamatan Pulo Aceh. Kabupaten Aceh Besar bagian kepulauan disisi Barat, Timur dan Utaranya dibatasi dengan Samudera Indonesia, Selat Malaka, dan Teluk Bangkala, yang memisahkannya dengan pulau Weh, tempat dimana Kota Sabang berada. Pulau-pulau utamanya adalah pulau Bireh dan pulau Nasi.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Karakteristik Responden

Responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini memiliki karakteristik berdasarkan umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan terakhir dan pendapatan rata-rata perbulan.

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

No	Uraian	Frekuensi	Presentasi
1	Umur		
	g. < 25	-	-
	h. 26-31	13	17,6
	i. 32-37	15	20,3
	j. 38-43	26	35,0
	k. 44-50	11	14,9
	l. > 51	9	12,2
Total		74	100,0
2	Jenis Kelamin		
	c. pria	49	66,2
	d. wanita	25	33,8
Total		74	100,0
3	Status Perkawinan		
	c. belum menikah	18	23,0
	d. menikah	56	77,0

Total		74	100,0
4	Pendidikan Terakhir		
	a. SLTA	-	-
	b. Diploma	20	27,0
	c. Sarjana	47	63,5
	d. Pasca Sarjana	7	9,5
Total		74	100,0
5	Pendapatan Rata-rata Perbulan		
	a. Rp. 2.600.000-	19	25,7
	Rp. 4.000.000	36	48,6
	b. Rp. 4.100.000-	19	25,7
	Rp. 5.500.00		
	c. > Rp. 5.500.000		
Total		74	100,0

Sumber Data diolah (2023)

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa mayoritas responden berusia antara 38 sampai 43 tahun sebanyak 26 responden atau 35,0 persen, hal ini di sebabkan berdasarkan kebutuhan di SKPD Kabupaten Aceh Besar dan tingkat masa kerja responden dari tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa berjenis kelamin pria yaitu sebanyak 49 responden atau 66,2 persen hal ini di sebabkan kebutuhan pria lebih banyak dibutuhkan oleh SKPD Kabupaten Aceh Besar daripada wanita. Kemudian karakteristik berdasarkan status perkawinan dapat di jelaskan yang sudah meikah adalah sbanyak 56 responden atau 77% hal ini secara rata-rata usia responden di SKPD Kabupaten Aceh Besar sudah di atas 30 tahun sehingga lebih banyak yang sudah menikah di usia tersebut. Karakteristik berdasarkan pendidikan terakhir dapat di

jelaskan yang berpendidikan terakhir sarjana yaitu sebanyak 47 responden atau 63,5%. pendapatan responden dapat di jelaskan bahwa sebanyak 36 responden atau 48,6% dengan pendapatan sebesar RP. 4.100.000 – RP. 5.500.000, artinya gaji yang diberikan oleh pihak SKPD Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan UMP.

4.2.2 Analisis Deskriptif

Penelitian ini mengamati 3 variabel bebas (indenendent variabel) yaitu variabel akuntabilitas (X1), variabel transparansi (X2), dan variabel partisipasi masyarakat (X3) dan juga mengamati satu variabel terikat (dependent variabel) yaitu kinerja Anggaran (Y).

1. Variabel Akuntabilitas

Penjelasan responden tentang variabel Akuntabilitas dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Akuntabilitas

No	Item Pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
1	Tahapan pengelolaan anggaran melibatkan unsur-unsur masyarakat	0	0	0	0	2	2,7	32	43,2	40	54,1	4,51
2	Anggaran disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat	0	0	0	0	1	1,4	31	41,9	42	56,8	4,55
3	Kepentingan publik dan golongan menjadi	0	0	0	0	2	2,7	37	50,0	35	47,3	4,45

	perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran											
4	Anggaran merupakan dokumen rahasia sehingga masyarakat tidak perlu tahu	1	1,4	2,	2,7	16	21,6	34	45,9	21	28,4	3,97
5	Indikator hasil kinerja yang akan dicapai ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi anggaran	0	0	2	2,7	3	4,1	31	41,9	38	52,4	4,42
6	Proses dan pertanggungjawaban anggaran diawasi secara terus-menerus	0	0	1	1,4	3	34,1	29	39,2	41	55,4	4,49
7	Penyajian anggaran telah menyertakan informasi masa lalu	0	0	1	1,4	6	8,1	39	52,7	28	37,8	4,27
8	Dalam mengevaluasi anggaran, hanya membandingkan target dengan realisasi/sesungguhnya	0	0	0	0	0	0	25	33,8	49	66,2	4,66
9	Penyajian laporan disajikan secara Tepat Waktu dan dapat dipahami	0	0	1	1,4	6	8,1	39	52,7	28	37,8	4,27
Rerata												4,40

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas pada indikator pertama bahwa Tahapan pengelolaan anggaran melibatkan unsur- unsur masyarakat dengan nilai rata-rata sebesar 4,51. Anggaran disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh

masyarakat dengan nilai rata-rata sebesar 4,55. Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran dengan nilai rata-rata sebesar 4,45. Anggaran merupakan dokumen rahasia sehingga masyarakat tidak perlu tahu sebesar 3,97. Indikator hasil kinerja yang akan dicapai ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi anggaran sebesar 4,42. Proses dan pertanggungjawaban anggaran diawasi secara terus-menerus sebesar 4,49. Penyajian anggaran telah menyertakan informasi masa lalu sebesar 4,27. Dalam mengevaluasi anggaran, hanya membandingkan target dengan realisasi/sesungguhnya sebesar 4,66. Penyajian laporan disajikan secara Tepat Waktu dan dapat dipahami sebesar 4,27. Nilai rerata pada variabel akuntabilitas sebesar 4,40 artinya responden menyatakan setuju karena satuan skala likert pada satuan angka 4.

2. Variabel Transparansi

Hasil penelitian tentang penjelasan responden mengenai Transparansi dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Transparansi

No	Item Pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
1	Pengumuman anggaran	0	0	0	0	4	5,4	36	48,6	34	45,9	4,41

	kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi											
2	Informasi yang diberikan kepada publik dapat meningkatkan transparansi anggaran	0	0	0	0	5	6,8	46	62,2	23	31,1	4,24
3	Mudah untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran	0	0	0	0	6	8,1	38	51,4	30	40,4	4,32
4	Musrembang dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran	0	0	0	0	5	6,8	42	56,8	27	36,5	4,30
Rerata												4,32

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat di jelaskan indikator yang pertama yaitu Pengumuman anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi dengan nilai rata-rata sebesar 4,41. Informasi yang diberikan kepada publik dapat meningkatkan transparansi anggaran dengan nilai rata-rata sebesar 4,24. Mudah untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran dengan nilai rata-rata sebesar 4,32. Musrembang dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran dengan nilai rata-rata sebesar 4.30. Nilai rerata pada variabel tranparansi sebesar 4,32 artinya responden menyatakan setuju karna satuan skala likert pada sauan angka 4.

3. Variabel Partisipasi Masyarakat

Hasil penelitian tentang penjelasan responden terhadap variabel Partisipasi Masyarakat dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Partisipasi Masyarakat

No	Item Pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
1	Menurut saya masyarakat dilibatkan dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD.	0	0	1	1,4	3	4,1	29	39,2	41	55,4	4,49
2	forum yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi media yang efektif terhadap revisi dan pelaksanaan anggaran.	0	0	1	1,4	6	8,1	39	52,7	28	37,8	4,27
3	saya kira masyarakat kurang berperan dalam penyusunan arah dan kebijakan APBD.	1	1,4	2	2,7	16	21,6	34	45,9	21	28,4	3,97
4	Saran dan kritik dari masyarakat Menurut saya , di jadikan pertimbangan untuk merevisi anggaran	0	0	1	1,4	6	8,1	39	52,7	28	37,8	4,27
Rerata												4,25

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dijelaskan indikator yang pertama yaitu masyarakat dilibatkan dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD dengan nilai rata-rata sebesar 4,49. forum yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi media yang efektif terhadap revisi dan pelaksanaan anggaran dengan nilai rata-rata sebesar 4,27. masyarakat kurang berperan dalam penyusunan arah dan kebijakan APBD dengan nilai rata-rata sebesar 3,97. Saran dan kritik dari

masyarakat Menurut saya ,di jadikan pertimbangan untuk merevisi anggaran dengan nilai rata-rata sebesar 4,27. nilai rerata pada variabel transparansi sebesar 4,25 artinya responden menyatakan setuju karna satuan skala likert pada satuan angka 4.

4. Variabel Kinerja Anggaran

Hasil penelitian tentang penjelasan responden mengenai variabel Kinerja Anggaran dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.5
Penjelasan Responden Terhadap Variabel Kinerja Anggaran

No	Item Pertanyaan	Sgt Tdk Setuju		Tidak Setuju		Kurang Setuju		Setuju		Sangat Setuju		Mean
1	Anggaran dikelola secara ekonomis untuk menghindari pengeluaran yang boros atau tidak produktif	0	0	1	1,4	2	2,7	28	37,8	43	58,1	4,53
2	Anggaran dikelola secara efektif dimana semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan	0	0	1	1,4	3	4,1	36	48,6	34	45,9	4,39
3	Anggaran dikelola secara adil (equity) dan merata (equality) dimana ada kesempatan social yang sama untuk mendapatkan pelayanan public yang Berkualitas	0	0	1	1,4	7	9,5	40	54,1	26	35,1	4,23
4	Adanya peran pemerintah daerah untuk	0	0	1	1,4	3	4,1	29	39,2	41	55,4	4,49

	memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah											
5	Alokasi belanja anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik	1	1,4	2	2,7	16	21,6	34	45,9	21	28,4	3,97
6	Penerapan prinsip ekonomis, efisien dan efektif dalam penggunaan anggaran.	0	0	1	1,4	6	8,1	39	52,7	28	37,8	4,27
7	Anggaran selalu digunakan secara efisien atau hemat dalam setiap pelaksanaan kegiatan.	0	0	1	1,4	6	8,1	39	52,7	28	37,8	4,27
Rerata												4,31

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat di jelaskan dari indikator yang pertama bahwa Anggaran dikelola secara ekonomis untuk menghindari pengeluaran yang boros atau tidak produktif dengan nilai rata-rata sebesar 4,53. Anggaran dikelola secara efektif dimana semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan dengan nilai rata-rata sebesar 4,39. Anggaran dikelola secara adil (equity) dan merata (equality) dimana ada kesempatan social yang sama untuk mendapatkan pelayanan public yang Berkualitas dengan niai rata-rata sebesar 4,23. Adanya peran pemerintah daerah untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah dengan nilai rata-rata sebesar 4,49. Alokasi belanja anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik dengan nilai rata-rata sebesar 3,97. Penerapan prinsip ekonomis, efisien dan efektif dalam penggunaan anggaran dengan nilai rata-rata sebesar 4,27. Anggaran selalu digunakan secara efisien atau hemat dalam setiap pelaksanaan

kegiatan dengan nilai rata-rata sebesar 4,27. Nilai rerata pada variabel peran audit internal sebesar 4,31 artinya responden menyatakan setuju karena satuan skala likert pada satuan angka 4.

4.2.3 Hasil Pengujian Data

1. Uji Validitas Instrumen

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik, yaitu dengan menggunakan uji pearson product – moment coefficient of correlation dengan bantuan SPSS. Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analysis correlation yang menjelaskan korelasi (hubungan) di antara sejumlah variabel dengan menggunakan satu set dimensi yang disebut faktor. Hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas

No Pertanyaan	Variabel	Koefisien Korelasi	Nilai kritis 5% (N=74)	Ket
1	A1	0,463	0,235	Valid
2	A2	0,486		
3	A3	0,313		
4	A4	0,438		
5	A5	0,583		
6	A6	0,535		
7	A7	0,548		
8	A8	0,443		
9	A9	0,429		
10	B1	0,639	0,235	Valid
11	B2	0,447		
12	B3	0,400		
13	B4	0,585		
14	C1	0,656	0,235	Valid

15	C2	Partisipasi Masyarakat	0,559	0,235	Valid
16	C3		0,436		
17	C4		0,559		
18	D1	Kinerja Anggaran	0,448	0,235	Valid
19	D2		0,441		
20	D3		0,430		
21	D4		0,676		
22	D5		0,595		
23	D6		0,423		
24	D7		0,595		

Sumber : Data diolah (2023)

Ukuran data di anggap valid apabila korelasi hitung lebih besar daripada angka kritis nilai $-r$ (tabel product moment). Semua pernyataan mempunyai nilai korelasi diatas nilai kritis 5% yaitu di atas 0,235, sehingga pernyataan-pernyataan tersebut adalah signifikan dan memiliki validitas. Atau dalam bahasa statistik terhadap konsistensi (internal consistence) yang berarti pernyataan-pernyataan tersebut mengukur aspek yang sama. Ini berarti data yang di peroleh adalah valid dan dapat digunakan untuk penelitian.

berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat di jelaskan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini di nyatakan semua valid, karena mempunyai koefisien korelasi diatas dari nilai kritis korelasi product moment yaitu sebesar 0,235 sehingga semua pertanyaan yang terkandung dalam kuesioner penelitian ini di nyatakan valid untuk di lanjutkan penelitian lebih mendalam.

2. uji reliabilitas instrumen

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan internal konsistensi atau derajat kedepan jawaban. Untuk pengujian ini di gunakan statistical package for social sciences (SPSS). Setelah melakukan pengujian reliabilitas untuk mengetahui konsistensi hasil sebuah jawaban tentang tanggapan responden. Untuk melakukan pengeujian reliabilitas penulis menggunakan program SPSS.

Tabel 4.7
Uji Reliabilitas variabel penelitian (Alpha)

No	Variabel	Nilai Minimal Kehandalan	Nilai Alpha	Kehandalan
1.	Kinerja Anggaran (Y)	0,60	0,770	Handal
2	Akuntabilitas (X1)	0,60	0,794	Handal
3.	Transparansi (X2)	0,60	0,734	Handal
4.	Partisipasi Masyarakat (X3)	0,60	0,721	Handal

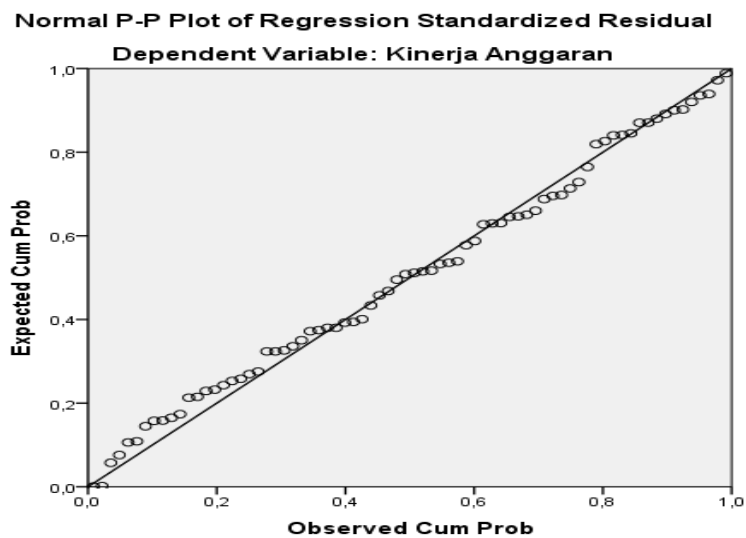
Pada tabel 4.7 hasil uji reliabilitas dapat di lihat dari nilai cronbach alpha, nilai cronbach alpha reliabilitas yang baik adalah yang makin mendekati 1, reliabilitas yang kurang dari 0,60 adalah kurang baik, sedangkan lebih dari 0,60 dapat di terima dan reliabilitas dengan cronbach alpha 0,80 atau diatasnya adalah baik. Dari hasil pengujian reliabilitas di atas dapat di ketahui bahwa reliabilitas variabel berdasarkan pengujian reliabilitas dari instrumen di ketahui bahwa hasil pembujian variabel penerapan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat seluruhnya adalah reliabel karena melebihi dari 0,60.

3. Uji Normalitas

Tabel 4.8
Hasil Uji Normalitas

	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	2,5678	4,9153	4,3088	,40896	74
Std. Predicted Value	-4,257	1,483	,000	1,000	74
Standard Error of Predicted Value	,022	,103	,038	,012	74
Adjusted Predicted Value	2,8804	4,9206	4,3115	,39484	74
Residual	-,56780	,39469	,00000	,16924	74
Std. Residual	-3,285	2,284	,000	,979	74
Stud. Residual	-4,091	2,334	-,007	1,041	74
Deleted Residual	-,88043	,41229	-,00274	,19383	74
Stud. Deleted Residual	-4,656	2,413	-,015	1,086	74
Mahal. Distance	,148	24,935	2,959	3,242	74
Cook's Distance	,000	2,304	,043	,267	74
Centered Leverage Value	,002	,342	,041	,044	74

Gambar 4.1



Pada gambar 4.1 penyebaran titik tersebut mengikuti arah garis diagonal. Hal

ini berarti bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas berdasarkan analisis grafik normal *p*-plot.

4. Uji Multikolinearitas

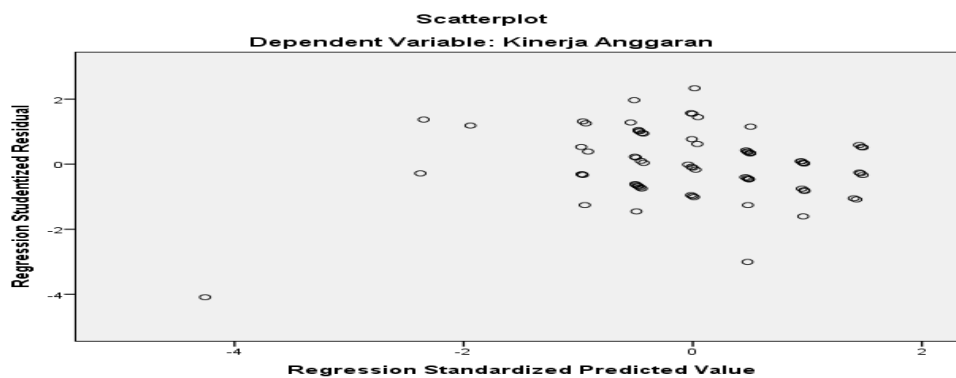
Tabel 4.9
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Akuntabilitas	,334	2,994
Transparansi	,972	1,028
Partisipasi	,339	2,947

Berdasarkan hasil pengujian tabel 4.9 Di atas, nilai VIF untuk semua variabel memiliki nilai lebih kecil dari 10 dan nilai Tolerance semua memiliki nilai lebih besar dari 0.1. Hal ini membuktikan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi Multikolinearitas.

5. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.2



Hasil Uji Heteroskedastiditas dari gambar 4.2 menunjukkan bahwa grafik scatter plot antara SRESID dan ZPRED menunjukkan pola penyebaran, dimana titik-

titik penyebaran secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat di simpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Pada model regresi, sehingga model regresi layak di pakai untuk memprediksi kinerja auditor berdasarkan variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

4.2.4 Regresi Linier Berganda

Hipotesis menyatakan bahwa faktor-faktor akuntabilitas (X1), transparansi (X2) dan Partisipasi Masyarakat (X3) berpengaruh terhadap Kinerja Anggran pada SKPD Kabupaten Aceh Besar. Model yang di gunakan untuk menduga pengaruh tersebut adalah:

Tabel 4.10
Hasil Pengujian Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,845	,350		2,413	,018		
Akuntabilitas	,020	,105	,015	,194	,847	,334	2,994
Transparansi	,024	,059	,019	,403	,688	,972	1,028
Partisipasi	,770	,066	,910	11,594	,000	,339	2,947

Berdasarkan hasil SPSS Versi 23 seperti terlihat tabel di atas, maka di peroleh persamaan regresi berganda sebagai berikut,

$$Y = -0,845 + 0,020X_1 + 0,24X_2 + 0,770X_3$$

Dari persamaan regresi linier berganda di atas dapat di ketahui hasil penelitian sebagai berikut:

1) Koefisien Regresi (β)

- a. Dalam penelitian nilai konstanta adalah 0,845 artinya bila mana akuntabilitas (X1), Transparansi (X2) dan Partisipasi Masyarakat (X3), dianggap konstan, maka kinerja anggaran pada SKPD Kabupaten Aceh Besar, adalah sebesar 0,845 pada satuan skala likert
- b. Koefisien regresi akuntabilitas (X1) sebesar 0,020. Artinya setiap 100% perubahan dalam variabel Akuntabilitas akan meningkatkan kinerja Anggaran pada SKPD Kabupaten Aceh Besar.
- c. Koefisien regresi transparansi (X2) sebesar 0,024. Artinya setiap 100% perubahan dalam variabel Transparansi secara relatif kan meningkatkan Kinerja Anggran pada SKPD Kabupaten Aceh Besar
- d. Koefisien regresi Partisipasi Masyarakat (X3) sebesar 0,770. artinya setiap 100% perubahan dalam variabel partisipasi masyarakat secata relatif akan meningkatkan kinerja anggran pada SKPD Kabupaten Aceh Besar.

2) Koefisien korelasi (R) dan determinasi

Untuk mnegetahui seberapa besar kenaikan suatu linier dapat di jelaskan melalui hubungan antara variabel-variabel (korelasi). Jika seluruh nilai dari variabel-variabel tersebut dapat memenuhi suatu persamaan dengan benar, maka dapat di

katakan terdapat korelasi yang sempurna dalam model analisis ini. Dari output SPSS dapat di ketahui tingkat hubungan variabe bebas dengan variabel terikat antara lain:

Tabel 4.11
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,924 ^a	,854	,848	,17283

Berdasarkan dari tabel 4.11 maka di peroleh koefisien korelasi dalam penelitian di peroleh nilai sebesar 0,924 dimana dengan nilai tersebut terdapat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah sebesar 92,4%. Artinya faktor akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), dan Partisipasi Masyaraat (X3) mempunyai hubungan yang sangat kuat terhadap kinerja anggran pada SKPD Kabupaten Aceh Besar.

Sementara itu koefisien determinasin yang di peroleh dengan nilai sebesar 0,848 artinya bahwa sebesar 84,8% perubahan –perubahan dalam variabel terikat (Kinerja Anggran pada SKPD Kabupaten Aceh Besar.) dapat di jelaskan oleh perubahan Akuntabilitas (X1), Transapransi (X2) dan Partisipasi Masyarakat (X3).

4.2.5 pengujian hipotesis

Untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat secara bersama maupun parsial terhadap kinerja anggran pada SKPD Kabupaten Aceh Besar.

1. Secara bersama-sama

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Anggaran menunjukkan nilai F hitung sebesar 136,242 sementara F tabel sebesar 4,15 . dengan taraf signifikansi 0,000. Taraf signifikan tersebut lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan hipotesis apabila F hitung > F tabel dengan tingkat signifikan 5%, H_a diterima H_0 ditolak. Akuntabilitas, Transpsaransi dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Anggaran. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel anova 4.12.

Tabel 4.12
Hasil uji F (Simultan)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12,209	3	4,070	136,242	,000 ^b
	Residual	2,091	70	,030		
	Total	14,300	73			

2. Secara parsial

Tabel 4.13
Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	,845	,350		2,413	,018
	Akuntabilitas	,020	,105	,015	0,194	,847
	Transparansi	,024	,059	,019	0,403	,688
	Partisipasi	,770	,066	,910	11,594	,000

Sumber : Hasil penelitian 2023 (data diolah)

Berdasarkan hasil pengujian parsial dengan uji t pada Tabel , dapat dinyatakan bahwa:

1. Hasil perhitungan variabel Akuntabilitas diperoleh nilai t hitung sebesar 0,194
Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_a diterima, artinya Akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Anggaran SKPD Kabupaten Aceh Besar.
2. Hasil perhitungan variabel Transparansi diperoleh nilai t hitung sebesar 0,403.
Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_a diterima, artinya Transparansi berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Anggaran SKPD Kabupaten Aceh Besar.
3. Hasil perhitungan variabel Partisipasi diperoleh nilai t hitung sebesar 11,594
Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_a diterima, artinya Partisipasi berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Anggaran SKPD Kabupaten Aceh Besar.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja anggaran

Pengujian secara bersama-sama dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat ada SKPD Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja Anggaran pada SKPD Kabupaten Aceh Besar.

4.4.2 pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk penerapan akuntabilitas adalah sebesar 0,020 yang berarti akuntabilitas mempengaruhi kinerja anggaran pada SKPD Kabupaten Aceh Besar. Hasil analisis menunjukkan nilai β_1 sebesar 0,020 dengan hasil perhitungan $\beta_1 \neq 0$, Dapat disimpulkan akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada SKPD Kabupaten Aceh Besar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Jamaluddin MD (2022) Karena variabel yang diteliti yaitu Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja anggaran.

4.4.3 pengaruh transparansi terhadap kinerja anggra

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk transparansi adalah sebesar 0,024 yang berarti transparansi mempengaruhi kinerja anggaran pada SKPD Kabupaten Aceh Besar. Hasil analisis menunjukkan β_2 sebesar 0,024 dengan hasil perhitungan $\beta_2 \neq 0$, Dapat disimpulkan transparansi secara parsial berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada SKPD Kabupaten Aceh Besar.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Yana Lubis (2022) Karena variabel yang diteliti transparansi sama-sama berpengaruh terhadap kinerja anggaran.

4.4.4 pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kinerja anggaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk partisipasi masyarakat sebesar 0,770 yang berarti partisipasi masyarakat mempengaruhi kinerja anggaran pada SKPD Kabupaten Aceh Besar. Hasil analisis menunjukkan nilai β_3 sebesar 770 dengan hasil perhitungan $\beta_3 \neq 0$, Dapat disimpulkan partisipasi masyarakat secara parsial berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada SKPD Kabupaten Aceh Besar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian, pengolahan, dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dengan nilai sebesar secara simultan berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada SKPD Kabupaten Aceh Besar dengan nilai yang di peroleh sebesar 0,924.
2. Akuntabilitas dengan nilai pengujian sebesar 0,020, Transparansi dengan nilai pengujian sebesar 0,024, dan Partisipasi Masyarakat dengan nilai pengujian sebesar 0,770 membuktikan bahwa secara parsial akuntabilitas, tarnsparansi dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kinerja anggaran pada SKPD Kabupaten Aceh Besar dengan nilai yang di peroleh sebesar

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran Kepada SKPD Kabupaten Aceh Besar sebagai berikut:

1. Di harapkan kepada SKPD Kabupaten Aceh Besar dapat meningkatkan pengelolaan pendapatan secara efektif dengan menerapkan Akuntanbilitas,

transpransi serta lebih melibatkan partisipasi dari masyarakat agar menghasilkan laporan keuangan yang memadai.

2. Di harapkan kepada Auditor baik internal maupun eksternal untuk melakukan Monitoring Evaluasi terhadap Laporan keuangan SKPD secara berkala
3. Untuk penelitian selanjutkan agar dapat menambahkan variabel lainnya seperti etika islam, penggunaan teknologi dan objek penelitian yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hafiz Tanjung. 2014. *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Annisa ningrum. (2010). *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Laporan Keuangan*
- Anugriani M.R., (2013). *Pengaruh Akuntabilitas,Transparansi dan pengawasan*
- Arif, B. (2016). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Baswir, R. (2017). *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Jamaluddin MD (2022) *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran pada pemerintah kota Samarinda*
- Kristianten (2006). *Indikator Transparansi Kinerja Anggaran*
- Mardiasmo, 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Saran Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan. 2(1).
- Marselina Saina Setia (2019) *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran berkonsep Value For Money pada pemerintah Malang*
- Meutia, Rita dan Nurfitriana. 2011. *Pengaruh Penerapan Good Governance terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Aceh*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. 1(2). 93-107.
- mulyadi, I. (2018). *Auditing*. Jakarta:Penerbit Salemba Empat
- Ni Luh Putu Uttari Premananda & Ni Made Yenni Letrini, 2017. *Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja anggaran pada pemerintahan kota dennpasar*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang *pedoman pengelolaan keuangan daerah*: Sekretariat Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Rahma Yana Lubis (2022) *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran pada Dinas Pengendalian Anak*
- Sugiyono (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Jakarta : Alfabeta
- supranto, MA. (2017). *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan Untuk Meningkatkan Pangsa Pasar*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Uttari Premananda (2017) *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Anggaran pada pemerintah kota Denpasar*
- Victorinus Laoli, SE., M.Si., Ak. 2019. *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Pemerintah Kabupaten Nias*. 3(1).
- Wanda Fernandes (2015) *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran pada pemerintah Kabupaten Kamper*
- Windayani, Santi. 2008. *Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Penggunaan Informasi Kinerja dalam Penganggaran*. JEB. 2(1): 9-28.

LAMPIRAN KUESIONER

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN PADA SKPD KABUPATEN ACEH BESAR

Lampiran : Kuesioner Penelitian
Perihal : Permohonan menjadi Responden

Dengan hormat,

Dengan segala kerendahan hati, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner ini. Saya berharap Bapak/Ibu menjawab dengan leluasa, sesuai dengan apa yang dirasakan, lakukan dengan alami, bukan apa yang seharusnya atau ideal. Sesuai dengan kode etik penelitian, data dan informasi yang Bapak/Ibu berikan akan dijamin kerahasiannya, dan hanya ditujukan untuk kepentingan ilmiah. Kesediaan Bapak/Ibu mengisi Kuesioner ini adalah bantuan yang tak ternilai bagi saya.

Atas perhatian dan bantuan Yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT dapat membalas kebaikan Bapak/Ibu sekalian dengan berlipat gandan. Aamiin.

Banda Aceh, 20 Desember 2023

Hormat Saya

Amallia Amanda

Petunjuk pengisian : beri tanda (v) pada coulum, yang sesuai dengan pertanyaan yang di pilih berdasarkan kondisi instansi saya.

1. Identitas saya

1. Umur

- a. 20-25 tahun
- b. 26-31 tahun
- c. 32-37 tahun
- d. 38-43 tahun
- e. 44-49 tahun
- f. $\geq$ 50 tahun

2. Jenis kelamin

- a. Pria
- b. Wanita

3. Status Perkawinan

- a. Belum menikah
- b. Menikah

4. Tingkat Pedidikan

- a. SLTA
- b. Diploma III
- c. Sarjana (S1)
- d. Pasca Sarjana (S2)
- e. Doktor (S3)

5. Penghasilan Perbulan

- a. Rp. 1.000.000 – Rp. 2.500.000
- b. Rp. 2.600.000 – Rp. 4.000.000
- c. Rp. 4.100.000 – Rp. 5.500.000
- d. $\geq$ Rp. 5.500.000

A. Daftar Pertanyaan Khusus

KUESIONER AKUNTABILITAS

NO	PERNYATAAN	STS	TS	KS	S	SS
1.	Tahapan pengelolaan anggaran melibatkan unsur-unsur masyarakat					
2.	Anggaran disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat					
3.	Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan anggaran					
4.	Anggaran merupakan dokumen rahasia sehingga masyarakat tidak perlu tahu					
5.	Indikator hasil kinerja yang akan dicapai ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi anggaran					
6.	Proses dan pertanggungjawaban anggaran diawasi secara terus-menerus					
7.	Penyajian anggaran telah menyertakan informasi masa lalu					
8.	Dalam mengevaluasi anggaran, hanya membandingkan target dengan realisasi/sesungguhnya					
9.	Penyajian laporan disajikan secara Tepat Waktu dan dapat dipahami					

KUESIONER TRANSPARANSI

NO	PERNYATAAN	STS	TS	RR	S	SS
1.	Pengumuman anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi					
2.	Informasi yang diberikan kepada publik dapat meningkatkan transparansi anggaran					
3.	Mudah untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran					
4.	Musrembang dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran					

KUESIONER PARTISIPASI MASYARAKAT

NO	PERNYATAAN	STS	TS	RR	S	SS
1.	Menurut saya masyarakat dilibatkan dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD.					
2.	forum yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi media yang efektif terhadap revisi dan pelaksanaan anggaran.					
3.	saya kira masyarakat kurang berperan dalam penyusunan arah dan kebijakan APBD.					
4.	Saran dan kritik dari masyarakat Menurut saya , di jadikan pertimbangan untuk merevisi anggaran					

KUESIONER KINERJA ANGGARAN

NO	PERNYATAAN	STS	TS	RR	S	SS
1.	Anggaran dikelola secara ekonomis untuk menghindari pengeluaran yang boros atau tidak produktif					
2.	Anggaran dikelola secara efektif dimana semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan					
3.	Anggaran dikelola secara adil (equity) dan merata (equality) dimana ada kesempatan social yang sama untuk mendapatkan pelayanan public yang Berkualitas					
4.	Adanya peran pemerintah daerah untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah					
5.	Alokasi belanja anggaran lebih berorientasi pada kepentingan pablik					
6.	Penerapan prinsip ekonomis, efesien dan efektif dalam penggunaan anggaran.					
7.	Anggaran selalu digunakan secara efesien atau hemat dalam setiap pelaksanaan kegiatan.					

HASIL PENGUJIAN

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,924 ^a	,854	,848	,17283

a. Predictors: (Constant), Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12,209	3	4,070	136,242	,000 ^b
	Residual	2,091	70	,030		
	Total	14,300	73			

a. Dependent Variable: Kinerja Anggaran

b. Predictors: (Constant), Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,845	,350		2,413	,018
	Akuntabilitas	,020	,105	,015	,194	,847
	Transparansi	,024	,059	,019	,403	,688
	Partisipasi	,770	,066	,910	11,594	,000

a. Dependent Variable: Kinerja Anggaran

Collinearity Diagnostics^a

Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions
-----------	------------	-----------------	----------------------

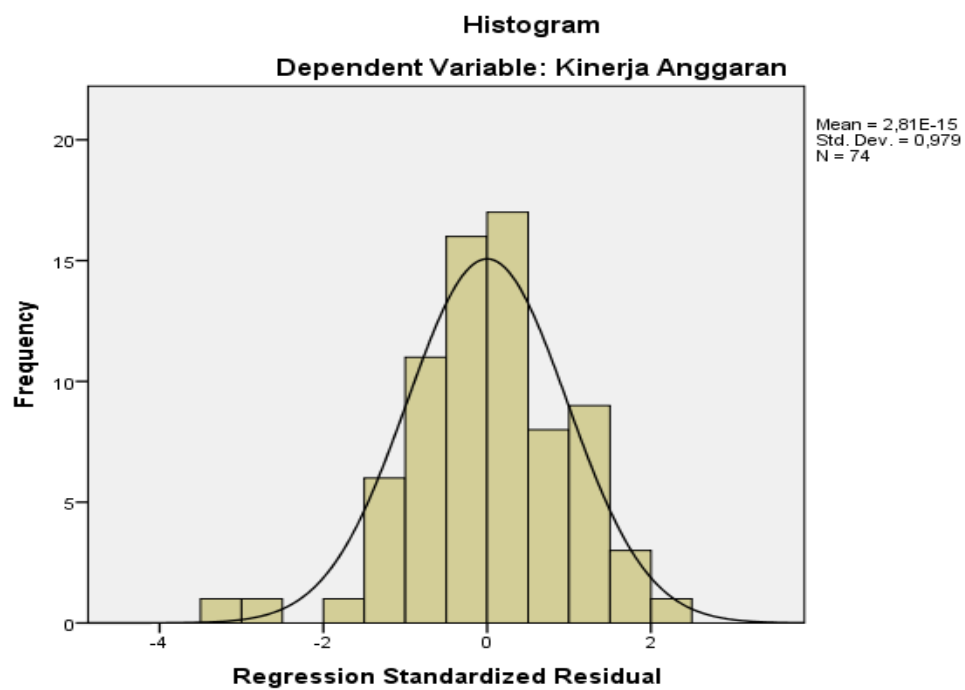
			(Constant)	Akuntabilitas	Transparansi	Partisipasi
1	3,985	1,000	,00	,00	,00	,00
2	,011	18,950	,03	,01	,20	,23
3	,003	35,658	,48	,04	,80	,13
4	,001	56,098	,49	,96	,00	,64

a. Dependent Variable: Kinerja Anggaran

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	2,5678	4,9153	4,3088	,40896	74
Std. Predicted Value	-4,257	1,483	,000	1,000	74
Standard Error of Predicted Value	,022	,103	,038	,012	74
Adjusted Predicted Value	2,8804	4,9206	4,3115	,39484	74
Residual	-,56780	,39469	,00000	,16924	74
Std. Residual	-3,285	2,284	,000	,979	74
Stud. Residual	-4,091	2,334	-,007	1,041	74
Deleted Residual	-,88043	,41229	-,00274	,19383	74
Stud. Deleted Residual	-4,656	2,413	-,015	1,086	74
Mahal. Distance	,148	24,935	2,959	3,242	74
Cook's Distance	,000	2,304	,043	,267	74
Centered Leverage Value	,002	,342	,041	,044	74

a. Dependent Variable: Kinerja Anggaran



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

